

Partisipasi Masyarakat Dalam Penegasan Batas Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam

Alfin Oktary¹, Ernawati²

¹²Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Padang
e-mail: alfinoktari09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam penegasan batas wilayah Nagari Panampuang di Sumatera Barat menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang, dengan rincian: memberikan informasi (72%), pengambilan keputusan bersama (69%), kerja sama (67%), dan dukungan kepentingan masyarakat (58%). Hasilnya menunjukkan penurunan partisipasi pada tahap yang lebih tinggi, namun terdapat potensi keinginan jangka panjang dalam aspek dukungan kepentingan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, dan budaya. Interaksi kompleks antar faktor ini menciptakan dinamika unik dalam partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi penguatan pendidikan, pengembangan mekanisme pengambilan keputusan inklusif, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal. Temuan ini memberikan dasar untuk strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegasan batas nagari dan pembangunan masyarakat secara luas.

Kata kunci: *Tingkat Partisipasi Masyarakat, Faktor-faktor Partisipasi, Batas Nagari*

Abstract

A This study examines community participation in the affirmation of Nagari Panampuang boundaries in West Sumatra using quantitative descriptive methods. The level of community participation is in the medium category, with details: providing information (72%), joint decision-making (69%), cooperation (67%), and support for community interests (58%). The results show a decline in participation at higher stages, but there is potential for long-term desirability in the aspect of supporting community interests. Factors that influence participation include level of education, experience and culture. The complex interactions between these factors create unique dynamics in community participation. Improving participation requires a holistic approach that includes strengthening education, developing inclusive decision-making mechanisms, and integrating local cultural values. The findings of this study provide a basis for

strategies to increase community participation in nagari boundary demarcation and community development at large.

Keywords : *Participation Rate, Participation Factors, Village*

PENDAHULUAN

Wilayah Sumatera Barat, memiliki bentuk wilayah Desa yang disebut dengan Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat di dalam wilayahnya. Dalam kesatuan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari, Wali Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyebutkan bahwa peta dasar harus menunjukkan batas wilayah. Batas wilayah merupakan garis khayal yang membatasi kecamatan/desa, distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan negara (Riadi & Makmuriyanto, 2014). Di permukaan bumi, batas wilayah dapat berupa bentang alam seperti sungai, punggung bukit, hutan, dan danau, atau bentang buatan manusia seperti jalan raya, rel kereta api, dan saluran irigasi (Asadi, 2016).

Penetapan batas wilayah melibatkan empat tahap, yaitu: Alokasi, Penetapan, Demarkasi, dan Administrasi (Jones, 1945). Tahap-tahap ini saling terkait (Sumaryo et al., 2010). Tahap administrasi dapat terjadi bersamaan dengan penegasan batas wilayah (Sutisna, 2006), yang memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap batas wilayah yang telah ditetapkan. Penetapan batas wilayah yang jelas dan sah merupakan hal yang penting (Arsana, 2007) dan harus dipastikan sebelum digunakan untuk proses administrasi daerah (Hidayat & Paksan Nagara, 2018).

Pembentukan dan penentuan batas wilayah suatu daerah adalah proses penting dalam administrasi negara yang mempengaruhi sejumlah kepentingan dan hak-hak masyarakat yang terlibat. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pemetaan geografis, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan terinformasi dari masyarakat dalam proses penetapan batas wilayah adalah suatu keharusan.

Beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam menentukan batas wilayah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 menjabarkan peran masyarakat dalam pemerintahan daerah, termasuk penentuan batas wilayah. Selain itu, Permendagri 45 Tahun 2016 memberikan pedoman untuk menentukan dan mengukuhkan batas wilayah.

Di Sumatera Barat, wilayah desa disebut Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dengan batas-batas tertentu yang berwenang untuk mengelola kepentingan lokal. Nagari memegang peranan penting dalam penentuan

dan penegasan batas wilayah, sehingga memerlukan koordinasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Proses ini sangat penting untuk menetapkan batas administratif dan mengurangi konflik. Namun, penentuan batas wilayah Nagari dapat menjadi tantangan dan sering kali menimbulkan perselisihan.

Dalam masyarakat Nagari, Wali Nagari memimpin dan mengelola pemerintahan nagari, mengawasi pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Mereka menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat dan organisasi lainnya. Wali Nagari memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik batas wilayah, bertindak sebagai mediator dan penengah untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Batas nagari sangat penting dalam penataan dan penataan nagari di Sumatera Barat. Batas nagari berfungsi sebagai batas geografis sekaligus simbol identitas dan nilai budaya nagari. Tim PPBN sering menghadapi tantangan dalam menetapkan batas nagari dengan nagari tetangga karena banyaknya faktor yang terlibat dan kurangnya masukan masyarakat dalam proses penetapan batas nagari.

Partisipasi masyarakat dalam penetapan batas wilayah akan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut: Keterbukaan: Informasi yang relevan dan dokumen terkait akan tersedia untuk masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Inklusivitas: Semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki kepentingan beragam, akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Kerjasama: Pemerintah dan masyarakat akan bekerja sama dalam proses ini untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Transparansi: Keputusan dan hasil proses penetapan batas wilayah akan dijelaskan secara transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Dari uraian diatas, peneliti merujuk pada Partisipasi Masyarakat dalam Penegasan Batas Nagari. Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat Nagari Panampuang tentang batas nagari dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari lingkungan masyarakat nyata untuk membahas isu-isu tertentu yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Statistik deskriptif diterapkan, termasuk perhitungan seperti persentase dan penyajian menggunakan tabel, grafik, diagram, dan alat bantu visual lainnya. Metode juga melibatkan perhitungan mean, modus, median, desil, persentil, distribusi data, rata-rata, simpangan baku, dan persentase (Sugiyono, 2011:112). Data difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penegasan batas-batas Nagari Panampuang di Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menurut Sudjana, 2006: 129 yaitu:

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P: Presentase

f : Frekuensi
n : Jumlah Responden

Sementara itu untuk pengategorian berdasarkan Mean dan Standar Deviasi menurut Sudijono 2009; 174 adalah sebagai berikut:

Interval	Kategori
$M + 1SD \leq X$	Tinggi
$M - 1SD \leq X < M + 1SD$	Sedang
$X < M - 1SD < X$	Rendah

Sumber: Sudijono 2009;174

Keterangan

M : Nilai Rata-rata
SD : Standar Deviasi
X : Skor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penegasann Batas Nagari

Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian didasarkan menurut Wilcox dalam Tri Wahyuni: Information (Informasi), Deciding Together (Pemutusan Bersama), Acting Together (Kerja Sama), Supporting Independent Community Interests (Dukungan Kepentingan Masyarakat) dilandasi Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat tentang Batas Nagari dalam Memberikan Informasi.

Tabel 1 Hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat Tim PPBN Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Informasi

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentasi
Tinggi	$X > 84.252$	6	11%
Sedang	$63.278 \leq X < 84.252$	26	72%
Rendah	$X < 63.278$	4	17%
Total		36	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 6 orang dengan persentase 11% memiliki tingkat partisipasi tinggi, sebanyak 26 orang dengan persentase 72% memiliki tingkat partisipasi sedang dan 4 orang dengan persentase 17% memiliki tingkat partisipasi rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tentang batas nagari dalam memberikan informasi berada pada kategori sedang.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat tentang Batas Nagari dalam Keputusan Bersama.

Tabel 16 Hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat Tim PPBN Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Keputusan Bersama

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentasi
Tinggi	$X > 62.628$	6	17%
Sedang	$62.628 \leq X < 83.760$	25	69%
Rendah	$X < 83.760$	5	14%
Total		36	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 6 orang dengan persentase 17% memiliki tingkat partisipasi tinggi, sebanyak 25 orang dengan persentase 69% memiliki tingkat partisipasi sedang dan 5 orang dengan persentase 14% memiliki tingkat partisipasi rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tentang batas nagari dalam memberikan informasi berada pada kategori sedang.

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat tentang Batas Nagari dalam Kerja sama.

Tabel 19 Hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat Tim PPBN Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Kerja Sama

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentasi
Tinggi	$X > 67.098$	6	17%
Sedang	$67.098 \leq X < 89.846$	24	67%
Rendah	$X < 89.846$	6	16%
Total		36	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 6 orang dengan persentase 17% memiliki tingkat partisipasi tinggi, sebanyak 24 orang dengan persentase 67% memiliki tingkat partisipasi sedang dan 6 orang dengan persentase 16% memiliki tingkat partisipasi rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tentang batas nagari dalam memberikan informasi berada pada kategori sedang.

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat tentang Batas Nagari dalam Dukungan Kepentingan Masyarakat.

Tabel 22 Hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat Tim PPBN Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Dukungan Kepentingan Masyarakat

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentasi
Tinggi	$X > 58.689$	10	28%
Sedang	$58.689 \leq X < 79.366$	21	58%
Rendah	$X < 79.366$	5	14%
Total		36	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang dengan persentase 28% memiliki tingkat partisipasi tinggi, sebanyak 21 orang dengan persentase 58% memiliki tingkat partisipasi sedang dan 5 orang dengan persentase 14% memiliki tingkat partisipasi rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tentang batas nagari dalam memberikan informasi berada pada kategori sedang.

PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penegasan Batas Nagari Panampuang

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Panampuang menggambarkan dinamika partisipasi yang kompleks, dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penegasan batas nagari berada pada tingkat kategori sedang pada setiap indikatornya, dengan rincian besaran persentase pada setiap indikator sebagai berikut: Dalam aspek pemberian informasi yang merupakan tingkat partisipasi awal, mayoritas masyarakat Nagari Panampuang (72%) menunjukkan tingkat partisipasi sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga cukup aktif dalam tahap awal proses partisipasi, namun masih ada ruang yang signifikan untuk peningkatan mengingat hanya 17% yang berada pada tingkat partisipasi tinggi. Fenomena serupa terlihat pada aspek pengambilan keputusan bersama, di mana 69% masyarakat berada pada tingkat partisipasi sedang. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pemberian informasi, pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cenderung menurun saat mencapai tahap yang lebih tinggi dalam bentuk partisipasi.

Partisipasi dalam kerja sama menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan partisipasi sedang 67% dan peningkatan partisipasi rendah menjadi 16%. Hal ini mendasari tantangan dalam mempertahankan keterlibatan aktif masyarakat pada tahap implementasi. Namun, tren positif terlihat pada aspek dukungan kepentingan masyarakat, di mana partisipasi tinggi meningkat menjadi 28%. Peningkatan ini menandakan bahwa sebagian masyarakat telah mencapai tingkat partisipasi yang lebih mandiri dan proaktif, meskipun mayoritas masih berada pada tingkat sedang.

Hasil analisis terkait cakupan partisipasi di Nagari Panampuang cukup luas, dengan mayoritas masyarakat berada pada tingkat partisipasi sedang di semua

indikator. Namun, kedalaman partisipasi menunjukkan penurunan bertahap dari tahap pemberian informasi ke tahap pekerjaan yang sama, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan tingkat keterlibatan yang tinggi sepanjang proses. Kualitas partisipasi terlihat dari adanya kelompok inti yang konsisten (17%) menunjukkan partisipasi tinggi pada tiga indikator pertama, dengan peningkatan signifikan pada indikator dukungan kepentingan masyarakat. Ini memberikan harapan positif untuk keberlanjutan partisipasi jangka panjang.

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Nagari Panampuang dalam penegasan batas nagari. Pertama, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong pergeseran dari partisipasi sedang ke tinggi, terutama pada tahap awal partisipasi. Kedua, pengembangan mekanisme yang lebih inklusif untuk pengambilan keputusan bersama, seperti forum warga atau sistem perwakilan yang efektif, dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, program pelatihan dan pemberdayaan perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada tahap implementasi. Keempat, sistem insentif atau penghargaan dapat diciptakan untuk mendorong inisiatif mandiri masyarakat dalam memberikan dukungan. Terakhir, evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat penting dilakukan untuk memahami hambatan partisipasi dan mengembangkan solusi bersama.

Dengan menerapkan pendekatan yang lebih terarah, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat Nagari Panampuang dapat ditingkatkan secara signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya akan mendukung keberhasilan proses penegasan batas nagari, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan masyarakat secara menyeluruh, menciptakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penegasan Batas Nagari Panampuang

Dalam mengetahui faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tentang batas nagari menggunakan 5 acuan indikator yang dikemukakan oleh Lestari (2015) yaitu, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Pengalaman, Budaya. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan budaya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang batas nagari.

Hasil penelitian dan observasi di lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penegasan batas nagari menunjukkan bahwa dari lima indikator yang dikemukakan oleh Lestari (2015), tiga faktor utama yang sangat berpengaruh adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan budaya. Tingkat pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu terkait batas nagari, memaksa mereka untuk menganalisis informasi secara lebih efektif dan berkomunikasi dalam forum-forum pengambilan keputusan. Sementara itu, pengalaman, baik individu maupun kolektif,

memberikan pengetahuan praktis dan pemahaman mendalam tentang pentingnya keterlibatan dalam proses-proses yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Faktor budaya, terutama dalam konteks nagari sebagai unit administratif tradisional di Sumatera Barat, juga sangat memengaruhi pola interaksi dan pengambilan keputusan masyarakat. Budaya gotong royong, musyawarah, dan sistem adat yang kuat dapat mendorong partisipasi aktif. Namun di sisi lain, beberapa aspek budaya juga berpotensi menghambat partisipasi kelompok tertentu.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan dinamika yang kompleks dalam partisipasi masyarakat. Misalnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memengaruhi cara seseorang memahami dan memanfaatkan pengalaman mereka dalam konteks pengambilan keputusan komunal. Demikian pula, budaya dapat memengaruhi sikap terhadap pendidikan dan bagaimana masyarakat menilai pengalaman dalam proses partisipasi. Meskipun usia dan pekerjaan juga merupakan faktor yang diidentifikasi oleh Lestari, dalam konteks penelitian ini keduanya tampak memiliki pengaruh yang kurang signifikan dibandingkan dengan tiga faktor utama tersebut. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya seperti meningkatkan program pendidikan masyarakat, menyediakan ruang untuk berbagi pengalaman, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penegasan batas nagari.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam penegasan batas Nagari Panampuang, Sumatera Barat. Hasil menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang di semua indikator yang diteliti. Terdapat penurunan partisipasi dari tahap pemberian informasi hingga implementasi, namun ada peningkatan signifikan dalam aspek dukungan kepentingan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan budaya. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan pendekatan komprehensif meliputi penguatan edukasi, pengembangan mekanisme pengambilan keputusan inklusif, program pelatihan, dan sistem insentif. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting dalam merancang strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang batas nagari, yang diharapkan dapat menciptakan partisipasi yang lebih luas, inklusif, dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Cetakan Pertama. 2016.
- Amelia Nur Talitha, Septy, Mochammad Makmur, Sis Widiyanto (2015) "Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah, Bag. Administrasi Pemerintahan,

- Subbag. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo". Malang, Universitas Brawijaya.
- Antomi Yudi, (2022), Pembuatan Peta dan Penegasan Batas Nagari Suliki, Kecamatan suliki, hal 1-2
- Antomi, Y., Afdhal, A., Khairani, K., & Angraina, D. (2022). Peran Konsultan Muda Kampus dalam Pemetaan Batas Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2), 280.
- Arifin, M (2021). Pemetaan dan Penetapan Batas Wilayah Secara Partisipatif Pasca Pemekaran di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan Kecamatan Kamang Magek, repository.unp.ac.id,
- Atalo, RF, Helan, YGT, & ... (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan *Cerdika: Jurnal ...*, cerdika.publikasiindonesia.id,
- Aulia Hashiddiqi, W. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *MAROSTEK Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18–27.
- Basuki, B (2023). Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif., eprints.uniska-bjm.ac.id,
- Candra, Andre Gusti (2020): Motif Penggunaan E-Money (Go Pay) di Kalangan Mahasiswa Kota Padang dalam Menghadapi Perubahan Gaya Hidup di Era Digital, Padang, Universitas Andalas.
- Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), h. 184.
- Evendi Irfan, Martini Rina.(2022). 'Resolusi Konflik Tanah Ulayat Pada Tahun 2000 Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam'. *Jurnal of politic and goverment studies*, vol. 11, no. 3, hh 12-20
- Haikal, Fadil (2019): Peran Pemerintah Daerah Menyelesaikan Konflik Pemekaran Nagari Antara Nagari Padang Laweh Selatan Dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung, Padang, Universitas Andalas.
- Hashiddiqi, WA (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal marostek.marospub.com*,
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Mansyur M. Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional. 2004.
- Khasanah, I. U., & Alfian, R. (2019). Pemetaan Partisipatif Batas Nagari Pilubang Studi Kasus Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 133.
- Lestari, T. (2015). *Kumpulan teori untuk kajian pustaka penelitian kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika,
- Manalu, Hendro Agustri (2020) : *Tinjauan Hukum Internasional Dalam Konflik Malaysia dan Brunei Darussalam Mengenai Batas Wilayah Tak Bertanda Di Daratan Sarawak tahun 1979*, Medan, Universitas Sumatera Utara

- Mikkelsen Britha. Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Minako, M, & Savella, R (2023). Konflik Tapal Batas antara Desa Tanjung Telang dengan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Indonesian Journal of Social..., journal.pubmedia.id,
- Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.1989.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Ramadhana, Rian (2021): "penyebab penolakan penetapan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh serta siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh". Padang, Universitas Andalas.
- Ricardianto, Edo (2017): Konflik Politik Penegasan Batas Daerah Pemerintah Kota Cirebon Dan Pemerintah Kabupaten Cirebon:Studi Kasus Kelurahan Sukapura Tahun 2015-2016, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.
- Saksitha, DA, & Jailani, MS (2024). Ragam Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Dalam Penelitian. Jurnal Genta Mulia, ejournal.stkipbbm.ac.id,
- Slamet Y. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Sebelas Maret University Press. 1994.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. Ke-1. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Theresia Aprilia. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Unfani, Lomin (2020): Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siompu Dan Siompu Barat (Studi Kasus Di Buton Selatan), Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.